

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andrianto, N., 2007. *Good e-Governance : Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui E-government*. Malang : Bayumedia Publishing.
- AG Subarsono. 2009. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. ((buku))
- Indrajit, Richardus Eko. 2002. *Membangun Aplikasi E-government*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Mulyawan, Rahman. 2016. *Birokrasi dan Pelayanan Publik*. Sumedang : Unpad Press.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik, Teori Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwandi, & Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

Jurnal

- Al-Nidawi, W, dkk. 2018. A review in E-government service quality measurement. Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science. 10(3): 1257-1265
- Azis, Herry Abdul (2008). "Integrasi e-Government: Tantangan, Kebijakan dan Implementasi". Jakarta: Seminar Pelayanan Publik dan E-government, Bappenas, 19 Desember 2008.
- Damanik, M dan Purwaningsih, E. 2017. E-Government Dan Aplikasinya Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kualitas Informasi Website Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau). Jurnal Studi Komunikasi dan Media. 21(2):151-164
- Denhardt, J.V., dan Denhardt, R.B., 2003. The New Public Service: An Approach to Reform. International Review of Public Administration Vol 8 No 1.

2004. *The New Public Service: Serving, Not Steering*. New York: M.E Sharve.
- Farah, Sintya. *Inovasi Sistem Perizinan Usaha Mikro Melalui OSS (Online Single Submission) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Semarang*. Departemen Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- FISIP Undip. 2020. *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Semarang: Undip.
- Forman, M. (2005). *Using IT to Transform the Effectiveness and Efficiency of Government*. *Journal E-government and Information Technology*.
- Hanintya, Anggita Putri. *Kegagalan Inovasi Daerah di Kota Semarang (Studi Kasus ; Inovasi Aplikasi i-Jus Melon Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang*.
- Holle, Erick. S. 2011. *Pelayanan Publik Melalui Electronic Government: Upaya Meminimalisir Praktek Maladministrasi dalam Meningkatkan Public Service*. *Jurnal Sasi*. 17(3):21-30
- Jonar, Hera Maitilova. 2017. *Analisis Penerimaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dalam Mendukung Penerapan E-Government pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat*. *PTEK-KOM*, Vol. 19(2): 121-132
- Karniawati, Nia dan Rahmadani, Rahmadani. 2011. *Analisis Kebijakan Penerapan E-Government Melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) (Suatu Studi pada Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat)*. *Majalah Ilmiah UNIKOM*. 7(2) :233-248.
- Kurniawan, Agung W dan Puspaningtyas, Zarah. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- O'Brien, James. A. (2005). *Introduction to Information Systems*. McGraw-Hill. New York
- Papadomichelaki, Xenia, dan Mentzas, Gregoris. 2012. *"e-Govqual: A Multiple-Item Scale for assessing e-government service quality."* *Government Information Quarterly*. 29(1) :98-109.

- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 pasal 35 membahas Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil.
- Prasetyo, Beni, dkk. Evaluasi Kualitas Layanan Electronic Pendapatan Asli. *Jurnal TEKNO KOMPAK*. 16(1):83-96.
- Pulzl, Helga dan Treib, Oliver. 2007. *Implementing Public Policy. Handbook of Public Policy analysis* 89-105
- Purnamasari, Henny. 2018. Efektivitas Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui Ijin Usaha melalui Online (Ijus Melon). *Jurnal Politikom Indosiana*, Vol. 3 No.2. Hal 94-103.
- R. Hendarta, N. H. Wardani, and A. D. Herlambang, “Evaluasi Kualitas Layanan Sistem Informasi Pelayanan (SIP) menggunakan Metode E-GovQual (Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember),” *J. Pengemb. Teknol. Inf. dan Ilmu Komputer.*, vol. 3, no. 9, pp. 9278–9283, 2019, [Online]. Available: <https://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/view/6389>.
- Riesta, Arrandi Muhammad, dkk. 2021. Evaluasi Kualitas Layanan Website E-Government Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan E-Govqual Dan Ipa. *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi dan Robotika*. 3(2) : 1-8.
- Shia, Ben Chang, et.al. 2016. Measuring Customer Satisfaction Toward Localization Website by WebQual and Importance Performance Analysis (Case Study on Aliexpress Site in Indonesia. *American Journal of Industrial and Business Management*. 6:117-128.
- Siau, Keng dan Long, Yuan. 2004. *A Stage Model for E-Government Implementation*. Idea Group Publishing. Tersedia di : https://www.researchgate.net/publication/265381273_A_Stage_Model_for_E-Government_Implementation
- Suhendra, Ardi dan Prasetyanto, Dwi. 2016. Kajian Tingkat Kepuasan Pengguna Trans Metro Bandung Koridor 2 Menggunakan Pendekatan Importance-Performance Analysis. *Jurnal Online Institut Teknologi Nasional*. 2(2): 59-70.

- Tri, Joko Nugraha. 2018. “*E-government* dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan *E-government* di Pemerintah Kabupaten Sleman)”. *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*. 2 (1) : 32-42.
- Verdegem, Pieter dan Verleye Gino. 2009. User-centered E-Government in practice: A comprehensive model for measuring user satisfaction. *Government Information Quarterly*. 26(3): 487-497.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

- Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Pasal 4)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Risiko
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Pasal 6).

Lain-lain

- BKPM.go.id. Pengenalan tentang OSS Berbasis Risiko. <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/pengenalan-tentang-oss-berbasis-risiko> (diakses 10 Oktober 2021)
- Djunaedi, A. 2002. Beberapa pemikiran Penerapan *E-government* dalam Pemerintahan Daerah di Indonesia. Seminar Nasional “*E-government & Workshop Linux FMIPA UGM*, 30 Oktober 2002, Yogyakarta.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. 2020. Teten Target Lima Tahun Ke Depan Sebanyak 48.000 Usaha Kecil Naik Kelas.

- <https://www.kemenkopukm.go.id/read/teten-target-lima-tahun-ke-depan-sebanyak-48-000-usaha-kecil-naik-kelas>. (diakses pada 19 April 2021).
- Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. Data UMKM. <https://www.kemenkopukm.go.id/data-umkm>. (diakses pada 10 Oktober 2021)
- Kompas.com. 2021. Kata Menteri Investasi, Ini Penyebab UMKM Enggan Urus Izin Usaha. <https://money.kompas.com/read/2021/08/12/155439726/kata-menteri-investasi-ini-penyebab-umkm-enggan-urus-izin-usaha?page=all>. (diakses pada 15 Oktober 2021)
- Republika. 2016. Birokrasi Masih Menghambat Perizinan UMKM. <https://www.republika.co.id/berita/koran/ekonomi-koran/16/05/27/o7tyg65-birokrasi-masih-menghambat-perizinan-umkm>. (diakses pada 10 Oktober 2021)
- Santia, Tira. 2020. *Berapa Jumlah UMKM di Indonesia? Ini Hitungannya*. Liputan 6. [https://www.liputan6.com/bisnis/read/4346352/berapa-jumlah-umkm-di-indonesia-ini-hitungannya#:~:text=Menurut%20Badan%20Pusat%20Statistik%20\(BPS,usaha%20yang%20beroperasi%20di%20Indonesia](https://www.liputan6.com/bisnis/read/4346352/berapa-jumlah-umkm-di-indonesia-ini-hitungannya#:~:text=Menurut%20Badan%20Pusat%20Statistik%20(BPS,usaha%20yang%20beroperasi%20di%20Indonesia). (diakses pada 10 Oktober 2021)
- Website Pemerintah Kota Semarang. http://semarangkota.go.id/p/33/profil_kota
- Paparan dr. Widoyono, M. Ph, Sosialisasi OSS RBA di Kecamatan Tembalang Kota Semarang oleh DPMPTSP Kota Semarang, 10 Maret 202